

# Perkembangan dan Konsep Dasar Pendidikan Lingkungan Hidup

Sudjoko, M.S.



## PENDAHULUAN

---

Pendidikan merupakan kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi. Sebenarnya pada hewan pun ada pendidikan, tetapi pendidikan itu hanya bersifat naluri (“teknologi” kodrati ?) dan hasil “belajar” (adaptasi) terhadap lingkungannya, agar hewan itu dapat memperoleh makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itu, pendidikan pada manusia yang membuat dirinya manusiawi bukanlah semata – mata pendidikan teknologi, melainkan pendidikan agama, filsafat, ilmu, seni dan budaya.

Pendidikan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat dengan PLH) adalah mengubah pandangan dan perilaku seseorang terhadap lingkungan. Orang yang tadinya masa bodoh dengan lingkungan diharapkan berubah menjadi peduli dengan lingkungannya. Orang tadinya hanya menjadi pemerhati pasif berubah menjadi pelaku aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, bahkan diharapkan juga orang yang tadinya berperan dalam perusakan dapat berubah menjadi pelaku aktif upaya pelestarian lingkungan. Upaya mengubah perilaku seseorang melalui pendidikan bukanlah hal yang dapat terlaksana dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu hasilnya tidak dapat diukur atau dinilai dalam kurun waktu yang pendek.

Dalam Modul 1 ini diuraikan tentang sejarah PLH dan konsep dasar PLH di Indonesia. Secara umum modul ini bertujuan untuk memahami pentingnya PLH dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Secara khusus setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. perkembangan PLH di tingkat internasional;
2. perkembangan PLH di tingkat ASEAN;
3. perkembangan PLH di Indonesia;

4. kendala dalam pelaksanaan PLH;
5. pengertian dan definisi PLH;
6. visi dan misi, tujuan, sasaran, ruang lingkup kebijakan, landasan, dan kebijakan PLH;
7. kebijakan umum dan strategi pelaksanaan PLH.

Untuk mempermudah cara Anda mempelajari, modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Belajar 2: Konsep Dasar Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

Konsep ekosistem menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari tempat atau lingkungan hidupnya. Sebagai salah satu jenis (spesies) makhluk hidup, manusia merupakan bagian dari jejaring kehidupan. Artinya, manusia juga sebagai salah satu komponen yang menempati mata-rantai daur materi dan transfer energi. Manusia dapat hidup karena ada komponen lain dalam ekosistem: oksigen, air, tumbuhan, dan hewan. Timbal-balik, manusia juga menghidupi komponen hayati lainnya, misal: tinja dan air seninya merupakan makanan bagi jenis makhluk hidup tertentu dan tubuhnya setelah meninggal diuraikan oleh jasad renik menjadi senyawa yang lebih sederhana sebagai mineral, air dan CO<sub>2</sub>. “Ketakwajaran” perilaku manusia yang telah menyimpang dari keteraturan atau sistem alam itulah yang akan menimbulkan permasalahan, berupa krisis lingkungan.

Menurut Arne Naess krisis lingkungan saat ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Perubahan cara pandang yang fundamental dan radikal dibutuhkan sebagai sebuah pola atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup saat ini. Pedoman itu tiada lain adalah etika lingkungan.

Cara pandang sangat menentukan gerak langkah manusia terhadap kegiatannya termasuk dalam memperlakukan alam ini. Selama ini telah berkembang dua cara pandang, yaitu **antroposentrisme** dan **ekosentrisme**. Kedua cara pandang ini mempunyai alasan (pertimbangan rasional) masing-masing. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, cara pandang ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia selain itu cara pandang ini pula melahirkan sikap yang rakus dan tamak yang menyebabkan manusia mengambil semua kebutuhan hidupnya dari alam tanpa memperhitungkan kelestariannya karena alam dipandang hanya demi kepentingan manusia

sehingga sebagian pihak mengatakan krisis lingkungan dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris ini. Imanuel Kant adalah salah seorang penganut teori ini mengatakan bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk rasional, manusia diperbolehkan secara moral menggunakan makhluk non rasional lainnya untuk mencapai suatu tatanan dunia yang rasional.

Cara pandang kedua, yaitu ekosentrisme yang merupakan kelanjutan teori biosentrisme (teori yang menganggap bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta). Antara biosentrisme dengan ekosentrisme bahkan sering disamakan begitu saja, karena ada kesamaan prinsip di antara keduanya. Ekosentrisme telah mendobrak cara pandang antroposentris, bahkan telah dikembangkan lebih lanjut hingga mencakup seluruh komunitas ekologis, yang dikenal dengan nama *Deep Ecology*. Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada tahun 1973 telah memelopori cara pandang ini.

Wacana yang lebih ekstrem menyatakan bahwa manusia adalah sebagai pihak tertuduh dalam hal makin keterpurukan kualitas bumi. Manusia dinilai telah terlampaui asyik dalam “memuaskan syahwatnya” tanpa mempedulikan lagi akibat atau dampak yang menerpa bumi kita. Mental dan nalar antroposentris dinilai sebagai asal-muasal pandangan antroposentrisme. Ironisnya, apa yang berkembang di masyarakat sekarang lebih diwarnai oleh cara pandang antroposentrisme yang telah merusak bumi ini, justru antroposentris ditahbiskan kesucian epistemologinya oleh ilmu pengetahuan modern. Vandana Siva, seorang tokoh ekofeminis India bahkan menyebut bahwa cara pandang antroposentrisme merupakan kabar buruk dari ideologi patriarkal barat.

Perkembangan konsep PLH di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan PLH di tingkat internasional dan Asia. Sebagai garapan pendidikan yang bertujuan utama untuk “kepentingan” lingkungan, di Indonesia berkembang dalam dua model yang diformulasikan dalam Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH), dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang terpisah dengan Pendidikan Kependudukan (PK). Penyatuan antara PLH dengan PK dalam PKLH memang cukup beralasan karena permasalahan lingkungan secara langsung melekat erat dengan masalah kependudukan, baik dalam segi kuantitatif maupun kualitatif penduduk. Sedangkan alasan pemisahan tampaknya lebih karena disiplin keilmuan (kajian) yang diyakini

sebagai landasan pengembangan bidang garapan pendidikan masing-masing, yaitu PLH lebih cenderung pada disiplin Sains (IPA) dan PK lebih cenderung pada disiplin Geografi.

### **1. Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Tingkat Internasional**

Pada tahun 1975, sebuah lokakarya internasional tentang PLH diadakan di Beograd, Jugoslavia, yang telah menghasilkan pernyataan antar negara peserta mengenai PLH yang dikenal sebagai “*The Belgrade Charter - a Global Framework for Environmental Education*”. Secara ringkas tujuan PLH yang dirumuskan dalam *Belgrade Charter* tersebut adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap keterkaitan bidang ekonomi, sosial, politik serta ekologi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
- b. memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, motivasi dan komitmen, yang diperlukan untuk bekerja secara individu dan kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan saat ini dan mencegah munculnya masalah baru;
- c. menciptakan satu kesatuan pola tingkah laku baru bagi individu, kelompok-kelompok dan masyarakat terhadap lingkungan hidup.

### **2. Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Tingkat ASEAN**

Program pengembangan pendidikan lingkungan bukan merupakan hal yang baru di lingkup ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN telah mengembangkan program dan kegiatannya sejak konferensi internasional PLH pertama di Belgrade tahun 1975. Sejak dikeluarkannya *ASEAN Environmental Education Action Plan 2000-2005*, masing-masing negara anggota ASEAN perlu memiliki kerangka kerja untuk pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan. Pada intinya *ASEAN Environmental Education Action Plan 2000 – 2005* ini merupakan tonggak sejarah yang penting dalam upaya kerja sama regional antar sesama negara anggota ASEAN serta turut meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan di masing-masing negara anggota ASEAN.

### **3. Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia**

Di Indonesia perkembangan penyelenggaraan pendidikan lingkungan dimulai pada tahun 1975. IKIP Jakarta (sekarang Universitas negeri Jakarta –

UNJ) untuk pertama kalinya merintis pengembangan pendidikan lingkungan dengan menyusun Garis-garis Besar Program Pengajaran PLH yang diujicobakan di 15 Sekolah Dasar di Jakarta pada periode tahun 1977/1978.

Pada tahun 1979 dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Bersamaan dengan itu pula mulai dikembangkannya pendidikan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL, kini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan = AMDAL) oleh semua PSL di bawah koordinasi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg-PPLH). Saat ini jumlah PSL yang menjadi anggota BKPSL telah berkembang menjadi 87 PSL. Di samping itu berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mulai mengembangkan dan membentuk program studi khusus ilmu lingkungan dan pendidikan lingkungan. Sebagai pelopor program studi ilmu lingkungan adalah IPB Bogor dan UI Jakarta, sedangkan program studi PKLH adalah IKIP Jakarta.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (menengah umum dan kejuruan), penyampaian masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guru-guru SD, SMP, dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan.

Prakarsa pengembangan pendidikan lingkungan juga dilakukan oleh berbagai LSM. Pada tahun 1996/1997 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2001 tercatat 76 anggota JPL yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan.

Sehubungan dengan kegiatan PLH di Indonesia, Kelompok Kerja Pendidikan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pokja PKSDH & L) telah membagi perkembangan kegiatan PLH di Indonesia ke dalam tiga periode, yaitu:

- a. Periode 1969-1983 (periode persiapan dan peletakan dasar)  
Usaha pengembangan pendidikan LH ini tidak bisa dilepaskan dari hasil Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang antara lain menghasilkan rekomendasi dan deklarasi antara lain tentang pentingnya kegiatan

pendidikan untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang memelopori pengembangan PLH di Indonesia dilakukan oleh IKIP Jakarta, yaitu dengan menyusun Garis-garis Besar Pendidikan dan Pengajaran (GBPP) bidang lingkungan hidup untuk pendidikan dasar. Pada tahun 1977/1978, GBPP tersebut kemudian diujicobakan pada 15 buah SD di Jakarta. Selain itu penyusunan GBPP untuk pendidikan dasar, beberapa perguruan tinggi juga mulai mengembangkan Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang salah satu aktivitas utamanya adalah melaksanakan kursus-kursus mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL). Program studi lingkungan dan konservasi sumber daya alam di beberapa perguruan tinggi juga mulai dikembangkan.

b. Periode 1983-1993 (periode sosialisasi)

Pada periode ini, kegiatan PLH baik di jalur formal (sekolah) maupun di jalur non formal (luar sekolah) telah semakin berkembang. Pada jalur pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, materi pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan konservasi SDA telah diintegrasikan ke dalam kurikulum 1984. Selama periode ini, berbagai pusat studi seperti Pusat Studi Kependudukan (PSK) dan Pusat Studi Lingkungan (PSL) baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta terus bertambah jumlah dan aktivitasnya. Selain itu, program-program studi pada jenjang  $S_1$ ,  $S_2$ , dan  $S_3$ , yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam juga terus berkembang. Bahkan isu dan permasalahan lingkungan hidup telah diarahkan sebagai bagian dari Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus diterima oleh semua mahasiswa pada semua program studi atau disiplin ilmu.

Perhatian terhadap upaya pengembangan PLH oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Departemen Pendidikan Nasional = Depdinas) juga terus meningkat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu dengan terus dimantapkannya program dan aktivitasnya melalui pembentukan Bagian Proyek KLH sebagai salah satu unit kegiatan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Pada periode ini sosialisasi masalah lingkungan hidup juga dilakukan terhadap kalangan administrasi negara dengan memasukkan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum

penjenjangan tingkat Sepada, Sepadya, dan Sespa pada Diklat Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 1989/1990. Di samping itu, selama periode ini pula banyak LSM serta lembaga *nirlaba* lainnya yang didirikan dan ikut mengambil peran dalam mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku ramah lingkungan. Secara keseluruhan, perkembangan kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat di atas tidak saja terjadi di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah lainnya.

c. Periode 1993 - sekarang (periode pematapan dan pengembangan)

Salah satu hal yang menonjol dalam periode ini adalah ditetapkannya Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan PLH, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen P & K juga terus mendorong pengembangan dan pematapan pelaksanaan PLH di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. Selain itu, berbagai inisiatif dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi dalam mengembangkan PLH melalui kegiatan seminar, sarasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.

Walaupun perhatian terhadap langkah-langkah pengembangan PLH pada satu atau dua tahun terakhir ini semakin meningkat, baik untuk pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, namun harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu terus selalu diperbaiki agar PLH dapat lebih memasyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PLH yang dilaksanakan mulai jenjang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi melalui berbagai bentuk kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal.





## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah bahwa cara pandang antroposentris belum cukup untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup manusia atau ekosistem! Setujukah Anda bahwa pandangan antroposentris juga disebut sebagai pandangan egoisme kelompok?
- 2) Ditinjau dari perkembangan PLH di Indonesia, sudahkah dunia pendidikan kita sadar bahwa PLH adalah untuk semua orang ? Nyatakan pula pendapat Anda, apakah kesadaran ini telah memberikan hasil yang nyata? Sertakan pula tolok ukur yang Anda pakai.
- 3) Jelaskanlah tentang “*Deep Ecology* !
- 4) Manakah pendapat yang Anda setuju tentang model pendidikan lingkungan sebagai PKLH atautkah PLH?
- 5) Dengan melihat perkembangan PLH di Indonesia, menurut Anda, pihak-pihak mana sajakah yang harus bertanggung jawab terhadap pengembangan PLH di Indonesia? Berikanlah rasional(alasan)nya!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Jelaskan dulu pengertian antroposentris, lawankanlah dengan pengertian ekosentris. Di sini akan terlihat manakah yang di antara kedua cara pandang itu yang mampu melestarikan lingkungan.  
Egoisme adalah paham bahwa terhadap suatu tindakan yang akan dan sedang dilakukan oleh seseorang hanya mempertimbangkan kepentingan diri-sendiri, alih-alih peduli terhadap kepentingan bumi dan seisinya, kepentingan orang lain pun diabaikannya. Dalam lingkup ekologi, bahaslah masalah ini dengan melihat manusia sebagai komponen ekosistem.
- 2) Lihatlah dari perkembangan program studi khusus lingkungan dan kegiatan lembaga yang bergerak dalam masalah lingkungan. Tentang keberhasilan cermatilah apa yang terjadi pada masyarakat, baik dengan pengamatan langsung maupun dari berbagai media massa.

- 3) Tinjaulah dari perkembangan ilmu bahwa tidak hanya “ilmu untuk ilmu” tetapi ilmu secara komprehensif telah mengaitkan relevansinya dengan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.
- 4) Tergantung pada rasional atau alasan dan asumsi yang Anda gunakan.
- 5) Idem seperti nomor 4.



## RANGKUMAN

---

PLH lahir karena kerisauan para pemikir bidang ilmu lingkungan dan pendidikan atas fenomena-fenomena kerusakan lingkungan yang kian hari kian meningkat. Kerusakan lingkungan pada gilirannya akan mempercepat kehadiran “kiamat”. Penyebab utama kerusakan lingkungan adalah perilaku manusia yang dilandasi oleh cara pandang yang salah terhadap lingkungan.

Perkembangan PLH di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PLH di tingkat internasional dan regional (ASEAN). Perkembangan ini dirintis oleh pakar pendidikan dan pakar ilmu lingkungan di lingkungan perguruan tinggi.

Perhatian pada PLH dan kesadaran akan pentingnya PLH sangat menggembirakan, karena berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah merasa berkepentingan dan ikut terlibat dalam PLH. Namun demikian, hal ini belum merupakan jaminan akan keberhasilan tujuan utama PLH.



## TES FORMATIF 1

---

Untuk soal-soal berikut ini, pilihlah :

- A, jika (1) dan (2) benar
  - B, jika (1) dan (3) benar
  - C, jika (2) dan (3) benar
  - D, jika (1), (2), dan (3) benar
- 1) Cara pandang ekosentrisme menyatakan bahwa kedudukan manusia dalam lingkungan hidupnya adalah ....
    - (1) lebih tinggi daripada makhluk hidup lain
    - (2) merupakan mata-rantai jejaring kehidupan
    - (3) sebagai makhluk omnivora

- 2) Cara pandang antroposentrisme akan diamalkan (diimplementasikan) sebagai perilaku manusia yang ....
  - (1) senantiasa mengeksploitasi lingkungan
  - (2) bekerja sama dengan makhluk hidup lain
  - (3) hanya mempertimbangkan kepentingan spesies manusia
  
- 3) Alasan di bawah ini *bukan* sebagai dalih bahwa model pendidikan lingkungan diselenggarakan terpisah antara Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pendidikan Kependudukan.
  - (1) Kecenderungan persoalan PLH dan Pendidikan Kependudukan (PK) pada disiplin ilmu masing-masing.
  - (2) Metode pembelajaran pada kedua model pendidikan itu berbeda.
  - (3) Kesalahpahaman antara pakar lingkungan dengan pakar kependudukan.
  
- 4) Perkembangan PLH di Indonesia ....
  - (1) telah dimulai pada dekade 1970-an
  - (2) berkait erat dengan “*The Belgrade Charter - a Global Framework for Environmental Education*”
  - (3) dirintis oleh kalangan perguruan tinggi
  
- 5) Pelaksanaan PLH di lembaga pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah ....
  - (1) telah tersedia kurikulum yang mandiri
  - (2) dikaitkan dengan kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler
  - (3) diintegrasikan pada hampir semua mata pelajaran
  
- 6) PLH juga menjadi bagian dari kurikulum di perguruan tinggi dan pendidikan bagi para pengambil keputusan, terbukti dari hal-hal ....
  - (1) dimasukkannya materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum penjenjangan tingkat Sepada, Sepadya, dan Sespada pada Diklat Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  - (2) kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan
  - (3) pembukaan program studi khusus lingkungan dan pendidikan lingkungan sampai pada jenjang S3
  
- 7) Berikut ini merupakan contoh bahwa persoalan kependudukan “melekat erat” dengan persoalan lingkungan, dan sebaliknya.
  - (1) Pemda DKI Jakarta telah mengembangkan *busway* dan berikutnya merencanakan *monorail* untuk mencari modal angkutan massal dalam menghadapi arus urbanisasi.

- (2) Semburan liar lumpur panas Sidoarjo menyebabkan gangguan pada fungsi peruntukan lahan lokasi yang terendam.
- (3) Persebaran penduduk yang tidakimbang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menyebabkan masalah “lahan tidur” di luar Pulau Jawa.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2**

## Konsep Dasar Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia

Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai salah satu pranata (instansi) yang ikut bertanggung jawab pada PLH, selain Depdiknas (dan bekerja sama), telah merumuskan Kebijakan Nasional tentang PLH yang dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan PLH. Acuan ini telah disosialisasikan kepada semua komponen dan masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tak langsung pada PLH, dengan melalui berbagai macam forum. Salah satu di antaranya adalah melalui situs internet <http://www.menlh.go.id>. Uraian secara lengkap dapat dibaca pada tulisan berikut ini.

### 1. Kendala Dalam Pelaksanaan PLH

Dalam pelaksanaan PLH selama ini, dijumpai berbagai situasi permasalahan yang dapat dianggap sebagai kendala dalam pelaksanaan PLH, antara lain:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan dalam PLH yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap permasalahan pendidikan lingkungan yang ada, rendahnya tingkat kemampuan atau keterampilan, dan rendahnya komitmen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
- b. Pemahaman para pelaku pendidikan terhadap pendidikan lingkungan yang masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari persepsi para pelaku pendidikan lingkungan hidup yang sangat bervariasi.
- c. Kurangnya komitmen pelaku pendidikan juga mempengaruhi keberhasilan pengembangan PLH. Dalam jalur pendidikan formal, masih ada kebijakan sekolah yang menganggap bahwa PLH tidak begitu penting sehingga membatasi ruang dan kreativitas pendidik untuk mengajarkan PLH secara komprehensif.
- d. Materi dan metode pelaksanaan PLH yang selama ini digunakan dirasakan belum memadai sehingga pemahaman kelompok sasaran mengenai pelestarian lingkungan hidup menjadi tidak utuh. Di samping itu, materi dan metode pelaksanaan PLH yang tidak aplikatif kurang

mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di daerah masing-masing.

- e. Sarana dan prasarana dalam PLH juga memegang peranan penting. Namun demikian, umumnya hal ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dari para pelaku. Pengertian terhadap sarana dan prasarana untuk PLH seringkali disalahartikan sebagai sarana fisik yang berteknologi tinggi sehingga menjadi faktor penghambat motivasi dalam pelaksanaan PLH.
- f. Kurangnya ketersediaan anggaran PLH. Perhatian Pemerintah yang belum mampu untuk mengalokasikan dan meningkatkan anggaran pendidikan lingkungan juga mempengaruhi perkembangan PLH tersebut. Selain itu, pelaksanaan PLH di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta tidak dapat maksimal karena terbatasnya dana/anggaran dan penggunaannya yang kurang efisien dan efektif.
- g. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan para pelaku pendidikan menyebabkan kurang berkembangnya PLH. Hal ini terlihat dengan adanya gerakan PLH (formal dan nonformal/informal) yang masih bersifat sporadis, tidak sinergis dan saling tumpang tindih.
- h. Belum adanya kebijakan Pemerintah yang secara terintegrasi mendukung perkembangan PLH di Indonesia, seperti misalnya kebijakan yang dilakukan selama ini hanya bersifat bilateral dan lebih menekankan kerja sama antar instansi (contoh: MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Departemen Pendidikan Nasional, MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Departemen Agama, dan lain-lain), sementara di beberapa kabupaten sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang secara spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah PLH.

Dari gambaran situasi permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurang berkembangnya PLH selama ini disebabkan oleh:

- a. lemahnya kebijakan pendidikan nasional;
- b. lemahnya kebijakan pendidikan daerah;
- c. lemahnya unit pendidikan (sekolah-sekolah) untuk mengadopsi dan menjalankan perubahan sistem pendidikan yang dijalankan menuju PLH;
- d. lemahnya masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR untuk mengerti dan ikut mendorong terwujudnya PLH;

- e. lemahnya proses-proses komunikasi dan diskusi intensif yang memungkinkan terjadinya transfer nilai dan pengetahuan guna pembaruan kebijakan pendidikan yang ada.

Untuk kepentingan perkembangan PLH di Indonesia pada masa yang akan datang maka perlu disusun suatu kebijakan nasional tentang PLH di Indonesia untuk dijadikan acuan bagi semua pihak terkait bagi pelaksanaan dan pengembangan PLH.

## 2. Pengertian dan Definisi

- a. *Pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. *Lingkungan Hidup* adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- c. *PLH* adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
- d. *PLH formal* adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dengan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolitik (tersendiri).
- e. *PLH nonformal* adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (misalnya pelatihan-pelatihan : AMDAL, ISO 14000, PPNS).

- f. *PLH informal* adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah dan dilaksanakan tidak terstruktur maupun tidak berjenjang.
- g. *Kelembagaan PLH* adalah seluruh lapisan masyarakat yang meliputi pelaku, penyelenggara dan pelaksana PLH, baik di jalur formal, nonformal dan informal.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Visi PLH, yaitu *Terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, kesadaran dan keterampilan untuk berperan aktif dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.*

Pada hakikatnya visi ini bertitik-tolak dari latar belakang permasalahan PLH yang ada selama ini dan sejalan dengan filosofi pembangunan berkelanjutan yang menekankan bahwa pembangunan harus dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang serta melestarikan dan mempertahankan fungsi lingkungan dan daya dukung ekosistem.

#### b. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) mengembangkan kebijakan pendidikan nasional yang berparadigma lingkungan hidup;
- 2) mengembangkan kapasitas kelembagaan PLH di pusat dan daerah;
- 3) meningkatkan akses informasi PLH secara merata;
- 4) meningkatkan sinergi antar pelaku PLH.

### 4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kebijakan

#### a. Tujuan PLH

Mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana,



turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup.

Sesuai dengan tujuan PLH maka disusunlah kebijakan PLH di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendorong semua pihak berperan dalam pengembangan PLH untuk pelestarian lingkungan hidup.

*b. Sasaran*

Sasaran kebijakan PLH adalah:

- 1) terlaksananya PLH di lapangan sehingga dapat tercipta kepedulian dan komitmen masyarakat dalam turut melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- 2) diarahkan untuk seluruh kelompok masyarakat, baik di pedesaan dan perkotaan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tujuan PLH bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik.

*c. Ruang lingkup*

Ruang lingkup kebijakan PLH meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) PLH yang melalui jalur formal, nonformal dan jalur informal dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder*.
- 2) Diarahkan kepada beberapa hal yang meliputi aspek: (a) kelembagaan, (b) SDM yang terkait dalam pelaku/pelaksana maupun objek PLH, (c) sarana dan prasarana, (d) pendanaan, (e) materi, (f) komunikasi dan informasi, (g) peran serta masyarakat, dan (h) metode pelaksanaan.

## **5. Landasan Kebijakan**

Kebijakan PLH disusun berdasarkan:

- a. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
- e. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Keputusan Bersama Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991

dan Nomor 38 Tahun 1991; tentang Peningkatan Pemasyarakatan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Melalui Jalur Agama.

- g. Piagam Kerja Sama Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/MENLH/8/1998 dan Nomor 119/1922/SJ tentang Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Bidang Lingkungan Hidup;
- h. Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 0142/U/1996 dan Nomor KEP:89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan PLH;
- i. Naskah Kerja Sama antara Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Malang sebagai Pusat Pengembangan PLH Nasional untuk Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Pengembangan Kelembagaan/Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 218/C19/TT/1996 dan Nomor B-1648/I/06/96 tentang Pengembangan PLH pada Sekolah Menengah Kejuruan.
- j. Komitmen-komitmen Internasional yang berkaitan dengan PLH.

## 6. Kebijakan Umum

Kebijakan umum PLH terdiri dari:

- a. Kelembagaan PLH menjadi wadah/sarana menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan  
Selama ini pelaksanaan PLH di lapangan masih banyak menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang dirasakan sangat krusial adalah belum optimalnya kelembagaan PLH di Indonesia sebagai wadah yang ideal dan efektif dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan PLH di lapangan. Kelembagaan PLH yang ideal dan efektif tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek yang meliputi antara lain:
  - 1) adanya kebijakan pemerintah pusat, daerah dan komitmen seluruh *stakeholder* yang mendukung pengembangan PLH;
  - 2) adanya jejaring dan kerja sama antar lembaga pelaksana PLH;
  - 3) adanya mekanisme kelembagaan yang jelas yang meliputi tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pelaku PLH;
  - 4) adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLH.

- b. Sumber daya manusia PLH yang berkualitas dan berbudaya lingkungan  
Berhasil tidaknya pelaksanaan PLH di lapangan ditentukan antara lain oleh kualitas dan kuantitas pelaku dan kelompok sasaran PLH. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku PLH (misalnya: guru, pengajar, fasilitator) diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, bersikap dan berperilaku serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup di sekitarnya.
- c. Sarana dan prasarana PLH sesuai dengan kebutuhan  
Agar proses belajar-mengajar dalam PLH dapat berjalan dengan baik, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi antara lain: laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, peralatan belajar-mengajar. Di samping itu, dalam melaksanakan PLH, alam dapat digunakan sebagai sarana pengetahuan.
- d. Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran PLH yang efisien dan efektif  
Penyelenggaraan PLH perlu didukung pendanaan yang memadai. Pendanaan dan pengalokasian anggaran bagi pelaksanaan PLH tersebut sangat bergantung kepada komitmen pelaku PLH di semua tingkatan, baik pusat dan daerah. Agar PLH dapat dilaksanakan dengan baik perlu adanya keterlibatan semua pihak dalam pengalokasian anggaran yang proporsional dan penggunaan anggaran PLH yang efisien dan efektif.
- e. Materi PLH yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, komprehensif dan aplikatif  
Penyusunan materi PLH harus mengacu pada tujuan PLH dengan memperhatikan tahap perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini. Untuk itu, materi PLH perlu dipersiapkan secara matang dengan mengintegrasikan pengetahuan lingkungan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, dan disusun secara komprehensif, serta mudah diaplikasikan kepada seluruh kelompok sasaran.
- f. Informasi yang berkualitas dan mudah diakses sebagai dasar komunikasi yang efektif  
Kualitas informasi tentang PLH perlu terus dibangun dan dijamin ketersediaannya agar setiap orang mudah mendapatkan informasi

tersebut. Informasi yang berkualitas dapat digunakan untuk pelaksanaan komunikasi efektif antar pelaku dan kelompok sasaran serta bagi pengembangan PLH.

g. Keterlibatan dan ketersediaan ruang bagi peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam PLH

Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PLH. Oleh karena itu, pelaku PLH perlu memberikan peran yang jelas bagi keterlibatan masyarakat tersebut.

h. Metode PLH berbasis kompetensi

Metode pelaksanaan PLH merupakan hal yang penting dan sangat berperan dalam menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Pengembangan metode pelaksanaan PLH yang baik (berbasis kompetensi dan aplikatif), dapat meningkatkan kualitas PLH sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

## 7. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Kebijakan PLH merupakan penjabaran kebijakan umum yang tertuang dalam butir B di atas. Strategi ini memberikan kerangka umum untuk mewujudkan cita-cita pengembangan PLH di Indonesia, sehingga dapat diciptakan manusia Indonesia yang berpengetahuan, berketerampilan, bersikap dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap nasib lingkungan hidup kita serta dapat turut bertanggung jawab aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di sekitar kita.

Strategi-strategi ini saling berkaitan satu dengan lainnya, namun demikian hal ini tidak berarti strategi-strategi harus menjadi satu kesatuan yang berturutan sehingga dalam pelaksanaan strategi tersebut tidak perlu dilaksanakan secara seri berdasarkan urutan strategi yang ada. Strategi Pelaksanaan ini meliputi:

a. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan PLH sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan dalam pelaksanaan PLH, yang ditujukan untuk:**

- 1) mendorong pembentukan, penguatan dan pengembangan (revitalisasi) kapasitas kelembagaan PLH;
- 2) mendorong tersusunnya kebijakan PLH di tingkat Pusat dan Daerah;

- 3) memperkuat koordinasi dan jaringan kerja sama pelaku PLH;
- 4) membangun komitmen bersama untuk PLH (termasuk komitmen pendanaan);
- 5) Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLH.

**b. Meningkatkan kualitas dan kemampuan (kompetensi) SDM PLH, baik pelaku maupun kelompok sasaran PLH sedini mungkin melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif**

Mengembangkan kualitas SDM Masyarakat, yang meliputi guru, murid sekolah, aparatur pemerintah, para ulama serta seluruh lapisan masyarakat sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh harus dilakukan melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif. Upaya ini harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa sehingga generasi muda, subjek dan objek pendidikan lingkungan dapat berkembang secara optimal.

Selain itu, peningkatan kemampuan SDM di bidang lingkungan hidup dalam profesionalitas (kompetensi) tenaga pendidik, dan peningkatan kualitas masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pada tingkat pengambil keputusan (birokrat) menjadi hal yang penting dilakukan juga dalam rangka pengembangan kebijakan PLH.

**c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana PLH yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efisien dan efektif**

Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana PLH dapat mendukung terciptanya tempat yang menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi dan berkomunikasi. Optimalisasi sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan menggunakan perpustakaan, laboratorium, alat peraga, alam sekitar dan sarana lainnya sebagai sumber pengetahuan.

**d. Meningkatkan dan memanfaatkan anggaran PLH dan mendorong partisipasi publik serta meningkatkan kerja sama regional, internasional untuk penggalangan pendanaan PLH**

Meningkatkan pendanaan PLH khususnya anggaran pada instansi yang melaksanakan PLH yang memadai diharapkan dapat memacu perluasan dan pemerataan perolehan pendidikan khususnya PLH bagi seluruh

rakyat Indonesia dan menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas. Saat ini anggaran pendidikan khususnya pendidikan lingkungan masih sangat minim, walaupun di dalam Amandemen UUD 1945, pagu anggaran pendidikan telah ditetapkan minimum sebesar 20% dari seluruh APBN.

Di samping itu, sumber pendanaan PLH dapat digalang dari masyarakat, baik lokal, regional maupun internasional.

- e. **Menyiapkan dan menyediakan materi PLH yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern serta global sesuai dengan kelompok sasaran PLH serta mengintegrasikan materi PLH ke dalam kurikulum lembaga pendidikan formal**

Penyusunan materi PLH harus mengacu pada tujuan PLH dengan memperhatikan tahap perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini. Untuk itu materi PLH yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern serta global harus disesuaikan dengan kelompok sasaran PLH.

- f. **Meningkatkan informasi yang berkualitas dan mudah diakses dengan mendorong pemanfaatan teknologi**

Dalam meningkatkan informasi yang berkualitas, pemanfaatan teknologi perlu terus diupayakan sehingga pengembangan pendidikan lingkungan dapat berhasil guna dan berdaya guna serta sekaligus dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi tentang pendidikan lingkungan hidup.

- g. **Mendorong ketersediaan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan PLH**

Dalam meningkatkan peran serta masyarakat di bidang PLH meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Pasal 54, UU Sidiknas 2003) perlu terus digalakkan. Selain itu, penyediaan ruang bagi masyarakat untuk partisipasi akan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PLH.

**h. Mengembangkan metode pelaksanaan PLH yang berbasis kompetensi dan partisipatif**

Metode pelaksanaan pendidikan lingkungan adalah hal yang sangat penting dan sangat berperan dalam menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Pengembangan metode pelaksanaan dalam PLH ditujukan pada pengembangan berbagai metode penyampaian PLH (antara lain melalui *joyful learning process*) pada setiap jenjang pendidikan dan pengembangan berbagai metode partisipatif tentang PLH.



**LATIHAN**

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah bahwa kualitas sumber daya manusia pelaku PLH sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PLH!
- 2) Jelaskan pula ungkapan yang menyatakan: “PLH untuk semua orang”!
- 3) “Tujuan pengembangan PLH untuk peserta didik adalah harus lebih menonjolkan ranah afektif (yaitu nilai, sikap, dan perilaku yang baik terhadap lingkungan) daripada sekadar ranah kognitifnya (pengetahuan) saja”. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Jika setuju, jelaskanlah apa fungsi pengetahuan lingkungan bagi pengembangan ranah afektif ini!
- 4) “Pelaksanaan PLH membutuhkan dukungan dari berbagai pihak”. Kaitkanlah pernyataan ini dengan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara. Jelaskanlah dengan memberikan contoh konkret!
- 5) Metode penyampaian PLH akan lebih menarik apabila guru mampu “mengemas”nya dengan pendekatan *joyful learning process*. Berilah contoh sebagian dari rangkaian kegiatan pembelajaran siswa yang mencerminkan pendekatan tersebut!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Lihatlah pada teks tentang latar belakang acuan pelaksanaan PLH yang dianggap sebagai permasalahan atau kendala. Anda akan dapat menemukan bahwa butir-butir tersebut berakar pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- 2) Anda dapat menjelaskannya dengan melihat pada sub-bab Sasaran PLH pada modul ini.
- 3) Anda dapat menjelaskannya dengan mengingat kembali tentang bagaimana prinsip-prinsip pembentukan ranah kognitif pada subjek didik.
- 4) Konsep Tripusat menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan itu ditunjang oleh keterpaduan pendidikan anak di sekolah, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakatnya. Nah, Anda dapat menjelaskannya bukan?
- 5) Prinsip *joyful learning* adalah bahwa belajar itu bukan merupakan beban atau keterpaksaan, tetapi dapat dilakukan dengan menyenangkan atau kegembiraan. Berilah contohnya kegiatan pada objek atau persoalan tertentu dalam materi lingkungan.

**RANGKUMAN**

---

Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup merupakan acuan pokok bagi PLH di Indonesia.

Rumusan kebijakan memiliki struktur dan arah yang jelas jika dilandasi oleh Latar belakang Permasalahan, yang selanjutnya akan mendasari rumusan Visi dan Misi PLH.

Visi dan Misi lebih lanjut akan mendasari Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kebijakan PLH.

Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kebijakan PLH memudahkan pemilihan Strategi Pelaksanaan Kegiatan yang lebih operasional, sesuai dengan permasalahan utama yang dihadapi PLH.



**TES FORMATIF 2**

---

Untuk soal-soal berikut ini, pilihlah:

- A,** jika (1) dan (2) benar
- B,** jika (1) dan (3) benar
- C,** jika (2) dan (3) benar
- D,** jika (1), (2), dan (3) benar

- 1) Sasaran PLH adalah semua manusia, artinya ....
  - (1) meliputi seluruh lapisan masyarakat
  - (2) meliputi segala tingkat usia
  - (3) lintas generasi
- 2) *Stake holder* (pemangku kepentingan) PLH meliputi ....
  - (1) individu, kelompok, dan masyarakat luas
  - (2) instansi pemerintah
  - (3) lembaga swadaya masyarakat
- 3) Tujuan PLH mencakup pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi ranah ....
  - (1) kognitif
  - (2) afektif
  - (3) psikomotor
- 4) PLH di Indonesia yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah ke bawah diselenggarakan dengan model ....
  - (1) monolitik
  - (2) integratif pada berbagai mata pelajaran
  - (3) “dititipkan” pada kegiatan non-kurikuler
- 5) Penyelenggaraan pembelajaran PLH yang memanfaatkan sarana dan kerja laboratorium memungkinkan anak didik mengembangkan kompetensi ....
  - (1) penguasaan pengetahuan lingkungan
  - (2) keterampilan akademik dan motorik dalam memecahkan masalah lingkungan
  - (3) partisipatif siswa pada penerapan situasi nyata

- 6) Pendekatan *joyful learning* pada metode pembelajaran PLH adalah pembelajaran yang ....
- (1) mengutamakan nilai-nilai ilmiah
  - (2) peserta didik tidak merasa terbebani
  - (3) permasalahannya menyangkut *human interest*
- 7) Pemanfaatan teknologi dalam PLH sudah harus menjadi tuntutan yang perlu dilakukan, karena alasan ....
- (1) pengelolaan lingkungan memerlukan teknologi
  - (2) teknologi sebagai “perpanjangan tangan” manusia yang membantu memecahkan masalah lingkungan
  - (3) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) meningkatkan eksploitasi lingkungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C. Kedudukan manusia lebih tinggi daripada makhluk lainnya dalam ekosistem dinyatakan oleh cara pandang antroposentris.
- 2) B. Bekerja sama dengan makhluk lain berarti mengakui kedudukan manusia dalam ekosistem sejajar dengan makhluk lain.
- 3) C. Metode pembelajaran keduanya pada prinsipnya sama, karena setiap disiplin pada prinsipnya pula harus menggunakan multi metode; sedangkan antara para pakar kedua disiplin ilmu itu juga tidak pernah terjadi salah paham, mereka bekerja pada bidangnya masing-masing.
- 4) D. Cukup jelas.
- 5) C. Jawaban (1) adalah penyelenggaraan PLH model monolitik, ini hanya dimungkinkan dilakukan oleh perguruan tinggi.
- 6) B. Jawaban (2) adalah PLH untuk masyarakat umum.
- 7) B. Jawaban (2) sebab dan akibat keduanya merupakan masalah lingkungan, belum dikaitkan dengan masalah kependudukan.

### *Tes Formatif 2*

- 1) B. Jawaban (2) kurang tepat, karena PLH hanya diperuntukkan bagi manusia yang sudah mulai timbul kesadaran dirinya, dalam hal ini bayi belum menjadi target sasaran PLH.
- 2) D. Cukup jelas.
- 3) D. Cukup jelas.
- 4) C. Model monolitik hanya dimungkinkan dilakukan oleh PT.
- 5) D. Cukup jelas.
- 6) C. PLH *tidak* meninggalkan nilai ilmiah, namun *bukan* menjadi pengutamakan agar tidak merupakan beban berat yang dirasakan peserta didik.
- 7) A. Jawaban (3) sebenarnya merupakan pernyataan yang benar, namun dalam konteks dengan PLH teknologi yang semata-mata hanya digunakan untuk mengeksploitasi sangat bertentangan dengan tujuan PLH.

## Daftar Pustaka

Hans Seidel Foundation. (1999). *Materi Pendidikan Lingkungan Hidup. Dasar, Strategi, dan Metode Pembelajaran*. Jakarta: Menara Cakrawala.

Husain Heriyanto. (2005). *Krisis Ekologi dan Spiritualitas Manusia*, dalam [http:// www.conservation.org](http://www.conservation.org) atau [www.conservation.or.id](http://www.conservation.or.id)

Kementerian Lingkungan Hidup, dalam <http://www.menlh.go.id>.

Mohamad Soerjani. (2000). *Kepedulian Masa Depan. Laporan Komisi Mandiri Kependudukan dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.

Situs <http://en.wikipedia.org/wiki/>

Situs <http://www.menlh.go.id>.

Timpakul. (2005). *Bermalam minggu di tepi jalan*. Celoteh Anak timpakul di Tepi Karangmumus, dalam <http://celoteh.timpakul.or.id>.

## Pengayaan

Setelah Anda menyelesaikan Modul 1, untuk lebih mendalami permasalahan PLH, pada bagian ini disediakan teks yang dapat Anda pelajari lebih lanjut.

### PROGRAM PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Agar Strategi Pelaksanaan tersebut dapat secara nyata dilaksanakan di lapangan maka perlu disusun Rencana Program pendidikan lingkungan hidup yang nantinya akan dilaksanakan dan ditempuh oleh seluruh pihak yang terkait dalam pendidikan lingkungan hidup, dan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: 1) program jangka pendek (1-3 tahun), 2) program jangka menengah (3-5 tahun), dan 3) program jangka panjang (5-10 tahun).

#### a. Program Jangka Pendek

Formal	Nonformal/Informal
<p>1. <i>Kelembagaan</i></p> <p>a. mengoptimalkan kapasitas kelembagaan, jaringan kerja sama, mekanisme dan sistem kerja sama dan koordinasi antar lembaga;</p> <p>b. membentuk pedoman penyusunan kebijakan PLH di Pusat dan daerah;</p> <p>c. menyusun peta lembaga/inventarisasi PLH di lembaga pendidikan formal;</p> <p>d. memfasilitasi dan menguatkan jaringan komunikasi PLH di dalam lembaga pendidikan formal;</p> <p>e. membangun dan mengembangkan forum komunikasi kelembagaan PLH di Pusat dan Daerah serta di institusi-institusi pendidikan lainnya;</p> <p>f. revitalisasi mekanisme kerja sama antar kelembagaan pelaku PLH.</p>	<p>1. <i>Kelembagaan</i></p> <p>a. mensosialisasikan kebijakan PLH;</p> <p>b. membangun dan mengembangkan forum komunikasi kelembagaan PLH di Pusat dan Daerah serta di institusi-institusi pendidikan lainnya;</p> <p>c. meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui jejaring PLH;</p> <p>d. menyusun peta PLH di Indonesia.</p>
<p>2. <i>SDM</i></p> <p>a. Melaksanakan ToT bagi pendidik;</p> <p>b. Melaksanakan PLH bagi peserta didik.</p>	<p>2. <i>SDM</i></p> <p>a. Melaksanakan ToT bagi fasilitator pendidikan;</p> <p>b. Melaksanakan PLH bagi kelompok sasaran.</p>

<b>Formal</b>	<b>Nonformal/Informal</b>
3. <i>Sarana dan Prasarana</i>	3. <i>Sarana dan Prasarana</i>
a. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana PLH; b. Mengembangkan sarana dan prasarana yang tersedia.	a. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana PLH; b. Mengembangkan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>	4. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>
Menyusun kajian strategi bagi alokasi anggaran yang berkaitan dengan PLH	Menyusun kajian strategi bagi alokasi anggaran yang berkaitan dengan PLH
5. <i>Materi PLH</i>	5. <i>Materi PLH</i>
Menyusun panduan ToT yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, komprehensif dan aplikatif.	Menyusun panduan ToT yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, komprehensif dan aplikatif.
6. <i>Komunikasi dan Informasi</i>	6. <i>Komunikasi dan Informasi</i>
a. Menyebarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan PLH; b. Mensosialisasikan PLH	a. Menyebarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup b. Mensosialisasikan PLH
7. <i>Peran Serta Masyarakat</i>	7. <i>Peran Serta Masyarakat</i>
Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan PLH	Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan PLH
8. <i>Metode Pelaksanaan</i>	8. <i>Metode Pelaksanaan</i>
a. Melakukan penilaian terhadap metode PLH yang ada saat ini; b. Menyusun panduan mengenai berbagai metode pembelajaran PLH; c. Melaksanakan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi dan partisipatif.	a. Melakukan penilaian terhadap metode PLH yang ada saat ini; b. Menyusun panduan mengenai berbagai metode pembelajaran PLH; c. Melaksanakan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi dan partisipatif.

## b. Program Jangka Menengah

Formal	Nonformal/Informal
1. <i>Kelembagaan</i>	1. <i>Kelembagaan</i>
a. Menyusun kebijakan PLH yang didasarkan atas kebijakan PLH di Indonesia; b. Terbentuknya <i>Clearing House</i> (Balai Kliring) yang dapat diakses oleh semua pelaku pendidikan formal.	a. Mensosialisasi atas kebijakan dan PLH berjenjang; b. MONEV kebijakan PLH c. Mengembangkan metode pelaksanaan PLH yang sesuai kelompok sasaran d. Pengayaan materi PLH berbasis kearifan lokal e. Mengembangkan sistem dan mekanisme pendanaan PLH yang partisipatif, transparan
2. <i>SDM</i>	2. <i>SDM</i>
a. Menyusun standar kompetensi pengembangan kualitas SDM PLH; b. Melaksanakan ToT bagi pendidik; c. Melaksanakan PLH bagi peserta didik.	a. Melaksanakan ToT bagi fasilitator pendidikan; b. Melaksanakan PLH bagi kelompok sasaran.
3. <i>Sarana dan Prasarana</i>	3. <i>Sarana dan Prasarana</i>
Membangun kerja sama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana PLH.	Membangun kerja sama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana PLH.
4. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>	4. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>
Menyusun kajian strategi bagi optimalisasi anggaran yang sudah ada di masing-masing sektor.	Menyusun kajian strategi bagi optimalisasi anggaran yang sudah ada di masing-masing institusi.
5. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>	5. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>
a. Mengoptimalkan dana pengembangan PLH yang ada pada <i>stakeholder</i> lainnya b. Meningkatkan penggunaan dana yang ada pada institusi bidang lingkungan dan bidang pendidikan bagi pengembangan PLH	a. Mengoptimalkan dana pengembangan PLH yang ada pada <i>stakeholder</i> lainnya b. Meningkatkan penggunaan dana yang ada pada institusi bidang lingkungan dan bidang pendidikan bagi pengembangan PLH

<b>Formal</b>	<b>Nonformal/Informal</b>
6. <i>Materi PLH</i>	6. <i>Materi PLH</i>
a. Menyusun buku/modul tentang PLH sesuai dengan jenjang pendidikan; b. Menyusun acuan kurikulum pelatihan/penataran/kursus lingkungan hidup berbasis kompetensi dan ekosistem secara nasional	a. Menyusun buku/modul tentang PLH untuk pendidikan LH non formal/informal b. Menyusun arahan pelatihan/penataran/kursus lingkungan hidup berbasis kompetensi dan ekosistem secara nasional
7. <i>Komunikasi dan Informasi</i>	7. <i>Komunikasi dan Informasi</i>
Membangun akses informasi yang berkaitan dengan PLH	Membangun akses informasi yang berkaitan dengan PLH
8. <i>Peran Serta Masyarakat</i>	8. <i>Peran Serta Masyarakat</i>
a. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan PLH; b. Menyusun peraturan yang menjamin tersedianya mekanisme partisipasi publik.	Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan PLH
9. <i>Metode Pelaksanaan</i>	9. <i>Metode Pelaksanaan</i>
a. Menyusun panduan mengenai berbagai metode pembelajaran PLH; b. Melaksanakan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi dan partisipatif.	a. Menyusun panduan mengenai berbagai metode pembelajaran PLH; b. Melaksanakan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi dan partisipatif.

c. *Program Jangka Panjang*

<b>Formal</b>	<b>Nonformal/Informal</b>
1. <i>Kelembagaan</i>	1. <i>Kelembagaan</i>
a. Mensosialisasikan kebijakan PLH; b. Menyusun pedoman dan melaksanakan monitoring dan evaluasi PLH; c. Melaksanakan PLH di jalur formal sejak usia dini; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLH; e. Menciptakan sistem penghargaan dan sanksi.	a. Mensosialisasikan kebijakan dan melaksanakan PLH; b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLH; c. Melaksanakan PLH di jalur non formal sejak usia dini.



Formal	Nonformal/Informal
2. <i>SDM</i>	2. <i>SDM</i>
Meningkatkan kreativitas pelaku pendidikan dan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.	Meningkatkan kreativitas pelaku pendidikan dan peserta didik.
3. <i>Sarana dan Prasarana</i>	3. <i>Sarana dan Prasarana</i>
Membangun sarana dan prasarana PLH sesuai dengan kondisi dan kemampuan institusi yang bersangkutan	Membangun sarana dan prasarana PLH sesuai dengan kondisi dan kemampuan institusi yang bersangkutan
4. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>	4. <i>Anggaran dan Pembiayaan</i>
Menyusun mekanisme pendanaan bagi pengembangan PLH	Menyusun mekanisme pendanaan bagi pengembangan PLH
5. <i>Materi PLH</i>	5. <i>Materi PLH</i>
Mengembangkan materi LH yang terintegrasi pada materi ajar	Mengembangkan materi LH yang terintegrasi pada materi ajar
6. <i>Komunikasi dan Informasi</i>	6. <i>Komunikasi dan Informasi</i>
Mengembangkan jejaring pendidikan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi	Mengembangkan jejaring pendidikan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi
7. <i>Peran Serta Masyarakat</i>	7. <i>Peran Serta Masyarakat</i>
Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan PLH	Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan PLH
8. <i>Metode Pelaksanaan</i>	8. <i>Metode Pelaksanaan</i>
a. Menyusun panduan mengenai berbagai metode pembelajaran PLH; b. Melaksanakan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi dan partisipatif.	a. Menyusun panduan mengenai berbagai metode pembelajaran PLH; b. Melaksanakan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi dan partisipatif.

(dari Kebijakan Nasional tentang PLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup)

#### a. **PLH: Bukan untuk Pembebanan Baru bagi Siswa**

Manusia terdiri atas pikiran dan rasa di mana keduanya harus digunakan. Rasa menjadi penting digerakkan terlebih dahulu, karena seringkali dilupakan. Bagaimana memulai PLH? PLH harus dimulai dari HATI. Tanpa sikap mental yang tepat, semua pengetahuan dan keterampilan yang diberikan hanya akan menjadi sampah semata.

Untuk membangkitkan kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, proses yang paling penting dan harus dilakukan adalah dengan menyentuh hati. Jika proses penyadaran telah terjadi dan perubahan sikap dan pola pikir terhadap lingkungan telah terjadi maka dapat dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola lingkungan hidup

#### **b. PLH: dalam buku catatan**

Pada tahun 1986, PLH dan kependudukan dimasukkan ke dalam pendidikan formal dengan dibentuknya mata pelajaran “Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH)”. Depdikbud merasa perlu untuk mulai mengintegrasikan PKLH ke dalam semua mata pelajaran

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (menengah umum dan kejuruan), penyampaian mata ajar tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guru-guru SD, SMP dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan. Di tahun 1996 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2004 tercatat 192 anggota JPL yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan.

Selain itu, terbit Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan PLH, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdikbud juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan PLH di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. Sementara itu, LSM maupun perguruan tinggi dalam mengembangkan PLH melalui kegiatan seminar, sarasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.

Pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama nomor: Kep No. 07/MenLH/06/2005 No.05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan PLH. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa PLH dilakukan secara integrasi dengan mata ajaran yang telah ada.

### c. PLH: bahan dasar yang dilupakan

Salah satu puncak perkembangan pendidikan lingkungan adalah dirumuskannya tujuan PLH menurut UNCED adalah sebagai berikut.

PLH (*environmental education* – EE) adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru [UN – Tbilisi, Georgia – USSR (1977) dalam Unesco, (1978)]

PLH memasukkan aspek afektif, yaitu tingkah laku, nilai dan komitmen yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable*). Pencapaian tujuan afektif ini biasanya sukar dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru perlu memasukkan metode-metode yang memungkinkan berlangsungnya klarifikasi dan internalisasi nilai-nilai. Dalam PLH perlu dimunculkan atau dijelaskan bahwa dalam kehidupan nyata memang selalu terdapat perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Perbedaan nilai tersebut dapat mempersulit untuk *derive the fact*, serta dapat menimbulkan kontroversi/pertentangan pendapat. Oleh karena itu, PLH perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun keterampilan yang dapat meningkatkan “kemampuan memecahkan masalah”.

Beberapa keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut ini.

- 1) Berkomunikasi: mendengarkan, berbicara di depan umum, menulis secara persuasive, desain grafis.
- 2) Investigasi (*investigation*): merancang survey, studi pustaka, melakukan wawancara, menganalisis data.
- 3) Keterampilan bekerja dalam kelompok (*group process*): kepemimpinan, pengambilan keputusan dan kerja sama.

**d. PLH haruslah:**

- 1) Mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas - alami dan buatan, bersifat teknologi dan sosial (ekonomi, politik, kultural, historis, moral, estetika).
- 2) Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada zaman pra sekolah, dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non formal.
- 3) Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner, dengan menarik/mengambil isi atau ciri spesifik dari masing-masing disiplin ilmu sehingga memungkinkan suatu pendekatan yang holistik dan perspektif yang seimbang.
- 4) Meneliti (examine) issue lingkungan yang utama dari sudut pandang lokal, nasional, regional dan internasional sehingga siswa dapat menerima insight mengenai kondisi lingkungan di wilayah geografis yang lain.
- 5) Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang potensial, dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya.
- 6) Mempromosikan nilai dan pentingnya kerja sama lokal, nasional dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah lingkungan.
- 7) Secara eksplisit mempertimbangkan/memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan.
- 8) Memampukan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merencanakan pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut;.
- 9) Menghubungkan (*relate*) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, keterampilan untuk memecahkan masalah dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup.
- 10) Membantu peserta didik untuk menemukan (*discover*), gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan.
- 11) Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan sehingga diperlukan kemampuan untuk berpikir secara kritis dengan keterampilan untuk memecahkan masalah.

- 12) Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (learning environment) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengenai dan dari lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung (*first – hand experience*).

Karena langsung mengkaji masalah yang nyata, PLH dapat mempermudah pencapaian keterampilan tingkat tinggi (*higher order skill*) seperti:

1. berpikir kritis;
2. berpikir kreatif;
3. berpikir secara integratif;
4. memecahkan masalah.

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang bersifat sistemik, kompleks, serta memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi atau isu yang diangkat dalam penyelenggaraan kegiatan PLH juga sangat beragam. Sesuai dengan kesepakatan nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesian Summit on Sustainable Development (ISSD) di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, telah ditetapkan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar adalah:

1. Pilar Ekonomi: menekankan pada perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pola konsumsi dan produksi, Teknologi bersih, Pendanaan/pembiayaan, Kemitraan usaha, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Industri, dan Perdagangan.
2. Pilar Sosial: menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Kearifan/budaya lokal, Masyarakat pedesaan, Masyarakat perkotaan, Masyarakat terasing/terpencil, Pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan Hukum dan pengawasan.

3. Pilar Lingkungan: menekankan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pengelolaan sumber daya air, Pengelolaan sumber daya lahan, Pengelolaan sumber daya udara, Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, Energi dan sumber daya mineral, Konservasi satwa/tumbuhan langka, Keanekaragaman hayati, dan Penataan ruang.

Kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi dialektis yang ajeg (*constant*) dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dipahaminya. Memandang kedua fungsi ini tanpa dialektika semacam itu, bisa menjebak kita ke dalam kerancuan berpikir. Objektivitas pada pengertian si penindas bisa saja berarti subjektivitas pada pengertian si tertindas, dan sebaliknya. Jadi, hubungan dialek tersebut tidak berarti persoalan mana yang lebih benar atau yang lebih salah. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg, yakni: Pengajar, Pelajar atau anak didik, dan Realitas dunia. Yang pertama dan kedua adalah subjek yang sadar (*cognitive*), sementara yang ketiga adalah objek yang tersadari atau disadari (*cognizable*). Hubungan dialektis semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan mapan selama ini.

Dengan kata lain, langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan pembebasannya Freire yakni suatu proses yang terus-menerus, suatu “commencement”, yang selalu “mulai dan mulai lagi” maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang terus-menerus dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Maka, proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti, mandeg, ia senantiasa harus terus berproses, berkembang dan meluas, dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat “kesadaran naif” sampai ke tingkat “kesadaran kritis”, sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni “kesadarannya kesadaran” (*the consice of the consciousness*).

Joseph Cornell, seorang pendidik alam (nature educator) yang terkenal dengan permainan di alam yang dikembangkannya sangat memahami psikologi ini. Sekitar tahun 1979 ia mengembangkan konsep belajar beralur (*flow learning*).

Berbagai kegiatan atau permainan disusun sedemikian rupa untuk menyingkronkan proses belajar di dalam pikiran, rasa, dan gerak. Ia

merancang sedemikian rupa agar kondisi emosi anak dalam keadaan sebaik-baiknya pada saat menerima hal-hal yang penting dalam belajar.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Aspek afektif: perasaan nyaman, senang, bersemangat, kagum, puas, dan bangga.
2. Aspek kognitif: proses pemahaman, dan menjaga keseimbangan aspek-aspek yang lain.
3. Aspek sosial: perasaan diterima dalam kelompok.
4. Aspek sensorik dan motorik: bergerak dan merasakan melalui indera, melibatkan peserta sebanyak mungkin.
5. Aspek lingkungan: suasana ruang atau lingkungan.

#### **e. PLH: terjerumus di jurang pembebanan baru**

Pendidikan saat ini telah menjadi sebuah industri. Bukan lagi sebagai sebuah upaya pembangkitan kesadaran kritis. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek jual-beli gelar, jual-beli ijazah hingga jual-beli nilai. Belum lagi diakibatkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebutuhan tempat belajar, telah menjadikan tumbuhnya bisnis-bisnis pendidikan yang mau tidak mau semakin membuat rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk. Pendidikan hanyalah bagi mereka yang telah memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan bagi kalangan miskin, pendidikan hanyalah sebuah mimpi.

Dunia pendidikan sebagai ruang bagi peningkatan kapasitas anak bangsa haruslah dimulai dengan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreativitas yang dimiliki. Sistem pendidikan yang mengebiri ketiga hal tersebut hanyalah akan menciptakan keterpurukan sumber daya manusia yang dimiliki bangsa ini yang hanya akan menjadikan Indonesia tetap terjajah dan tetap di bawah ketiak bangsa asing.

Pada dua tahun terakhir, PLH di Kalimantan Timur sangatlah berjalan perlahan di tengah hiruk-pikuk penghabisan kekayaan alam Kaltim. Inisiatif-inisiatif baru bermunculan. Kota Balikpapan memulai, dengan dibantu oleh Program Kerja sama Internasional, lahirnya kurikulum pendidikan kebersihan dan lingkungan yang menjadi salah satu muatan lokal. Diikuti kemudian oleh Kabupaten Nunukan. Sementara saat ini sedang dalam proses adalah Kota Samarinda, Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan. Kesemua wilayah ini terdorong ke arah “jurang” hadirnya muatan lokal beraroma PLH.

Tak ada yang salah dengan muatan lokal. Namun, sangat disayangkan dalam proses-proses yang dilakukan sangat meninggalkan prinsip-prinsip dari PLH itu sendiri. Nuansa hasil yang berwujud (buku, modul, kurikulum), sangat terasa dalam setiap aktivitas pembuatannya. Perangkat-perangkat pendukung masih sangat jauh mengikutinya.

PLH hari ini, bisa jadi mengulang pada kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika PKLH mulai diluncurkan. Statis, monolitik, membunuh kreativitas. Prasyarat yang belum mencukupi yang kemudian dipaksakan, berakhir pada frustrasi berkelanjutan.

Sangat penting dipahami, bahwa pola Cara Belajar Siswa Aktif, Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan berbagai teknologi pendidikan lainnya yang dikembangkan, kesemuanya bermuara pada kapasitas seorang guru. Kemampuan berekspresi dan berkreasi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Bila tidak, lupakanlah.

Demikian pula dengan PLH, sangat dibutuhkan kapasitas guru yang mampu membangkitkan kesadaran kritis. Bukan sekadar untuk memicu kreativitas siswa. Kesadaran kritis inilah yang akhirnya akan tereliminasi di saat PLH diperangkap dalam kurikulum muatan lokal. Siswa akan kembali berada dalam ruang statis, mengejar nilai semu, dan memperoleh pembebanan baru.

#### **f. PLH: duduk, diam, dan bercerminlah**

Sejak 2001, di saat pertama kali kawan-kawan aktivis PLH di Kaltim berkumpul, telah lahir berbagai gagasan dan agenda yang harus diselesaikan. Namun, karena bukan menjadi PRIORITAS, maka hal ini menjadi bagian yang dilupakan.

Di tahun 2005 ini, geliat PLH masih bergerak-gerak di tempat. Bagi yang memiliki dana, muatan lokal menjadi sebuah pilihan, karena akan lebih mudah mengukur indikator keberhasilannya. Bagi yang tidak memiliki dana, mencoba tertatih-tatih di ruang sempit untuk tetap berjalan sesuai dengan cita-cita sebenarnya dari PLH, yaitu membangun generasi yang memiliki KESADARAN KRITIS sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni “KESADARANNYA KESADARAN”.

Kepentingan untuk PERCEPATAN PLH, haruslah dimaknai bukan untuk mengELIMINASI pondasi dasar PLH. Tidak kokohnya pondasi akan mengakibatkan kehancuran sebuah bangunan, semewah apapun ia. Kehausan akan target proyek, capaian indikator, pekerjaan, hanya akan menjadikan



PLH sebagai sebuah objek mainan baru, bukan lagi sebagai sebuah nilai yang sedang dibangun bagi generasi kemudian negeri ini.

BERCERMINLAH untuk sekadar meREFLEKSikan diri. Ini yang penting dilakukan oleh pegiat PLH. Bukan untuk berlari mengejar ketertinggalan. Tidak harus cepat mencapai garis akhir. Berjalan perlahan dengan semangat kebersamaan akan lebih menghasilkan nilai yang tertancap pada ruang yang terdalam di diri. APAKAH YANG SEDANG KITA LAKUKAN HANYA AKAN MENJADI PEMBEBANAN BARU BAGI GENERASI KEMUDIAN?